

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini disusun melalui proses partisipatif, teknokratis, dan politis. Pada tahap persiapannya, telah dibentuk tim penyusunan Renja, yang kemudian bekerja menjalin aspirasi *stakeholder* terkait sehingga tersusunnya dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renja ini tidak serta-merta ditetapkan, namun melalui berbagai literasi untuk menyesuaikan dengan proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem Perencanaan Daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Renja merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu merencanakan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB.

Untuk itu, berdasarkan pemikiran tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membuat dokumen rencana kerja untuk diusulkan pada tahun anggaran 2025. Tentunya telah dilakukan evaluasi capaian pada tahun sebelumnya agar dijadikan pedoman pelaksanaan untuk tahun berikutnya. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan penganggaran yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dibaca dan ditelaah oleh *stakeholder* yang berkepentingan dengan dinas ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Hak Anak;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anak;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak No 13 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana
22. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020 – 2024
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
25. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026
27. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara.
28. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
29. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah untuk menjadi kerangka acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Halmahera Utara.
2. Menjadikan rencana Kerja sebagai acuan dalam perencanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Halmahera Utara.
4. Sebagai pedoman dalam pengusulan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dalam pelaksanaan Forum PD dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja DP3AKB dengan sistematika antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DP3AKB TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, DP3AKB

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V PENUTUP**

BAB II**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra DP3AKB**

Melalui evaluasi dapat diidentifikasi sejauh mana proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi inilah yang hendaknya merupakan titik tolak perencanaan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan dimasa mendatang.

Evaluasi Rencana kerja tahun 2023 adalah merupakan tahun keempat dari rencana kerja program dan kegiatan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026 Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan maka akan memuat kajian (review) terhadap yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB tahun bersangkutan. Sedangkan untuk melihat keberhasilan atau capaian rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dengan dicanangkan program dan kegiatan pada tahun 2023 maka bisa dilihat dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB tahun-tahun sebelumnya.

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2023

TABEL 2.106.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara
sampai dengan Tahun 2023

				No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome/Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Urusan/ Perangkat Daerah	Ket
				1	5	6	8		9		10		11	12
					Tujuan 1: Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas serta Meningkatkan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak	Total angka kelahiran (TFR)	2,4		1,96					
						Indeks Pemberdayaan Gender	68,95		90,08					
						Indeks Kabupaten Layak Anak	501							
					Sasaran 1: Menurunnya Angka kelahiran	Penurunan Total angka kelahiran (TFR) (Basis poin)	-0,05		0,36					
					Sasaran 2: Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	46,30		84,92					
						Persentase jumlah Indikator KLA yang telah terpenuhi	58,33 %		35,13					
						Rasio KDRT	0,063		0,081					

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

					Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65,00							
2	8				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90,00	3.212.715.294	93,54	2.051.183.953	103,93	2.051.183.953	DP3AKB	
2	8	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat konsisten perencanaan perangkat daerah	100,00	28.032.000	83,00	27.954.400	83,00	27.954.400	DP3AKB	
2	8	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	14.000.000	3	14.000.000	100,00	14.000.000	DP3AKB	
2	8	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.000.000	1	3.000.000	100,00	3.000.000	DP3AKB	
2	8	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	1.000.000	DP3AKB	
2	8	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	1.000.000	DP3AKB	
2	8	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	1.000.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	8	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	8.032.000	4	7.954.400	100,00	7.954.400	DP3AKB	
2	8	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah	100,00	2.783.074.582	70,75	1.860.516.676	70,75	1.860.516.676	DP3AKB	
2	8	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	2.776.774.582	364	1.854.310.576	104,00	1.854.310.576	DP3AKB	
2	8	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	6.300.000	4	6.206.100	100,00	6.206.100	DP3AKB	
2	8	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	100	21.500.000	100	21.409.400	100,00	21.409.400	DP3AKB	
2	8	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	500.000	1	500.000	100,00	500.000	DP3AKB	
2	8	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.000.000	1	909.400	100,00	909.400	DP3AKB	
2	8	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	20.000.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	8	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	185.117.400	97,22	60.990.839	97,22	60.990.839	DP3AKB	
2	8	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	14.390.300	2	-	100,00	-	DP3AKB	
2	8	1	02.06	4	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	10.000.000	12	8.011.200	100,00	8.011.200	DP3AKB	
2	8	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	8.669.500	12	976.400	100,00	976.400	DP3AKB	
2	8	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	6.000.000	12	150.000	100,00	150.000	DP3AKB	
2	8	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	8.073.600	12	8.073.600	100,00	8.073.600	DP3AKB	
2	8	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	137.984.000	10	43.779.639	83,33	43.779.639	DP3AKB	
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	78.000.000	100,00	19.500.000	100,00	19.500.000	DP3AKB	
2	8	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	78.000.000	1	19.500.000	100,00	19.500.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Cakupa Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	100,0 0	70.991.312	62,50	40.918.900	62,50	40.918.900	DP3AKB	
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	32.584.408	7	24.568.400	58,33	24.568.400	DP3AKB	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7.262.800	12	1.628.000	100,00	1.628.000	DP3AKB	
2	8	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	7.870.000	4	2.840.000	33,33	2.840.000	DP3AKB	
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	23.274.104	7	11.882.500	58,33	11.882.500	DP3AKB	
2	8	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	100,0 0	46.000.000	100,0 0	19.893.738	100,00	19.893.738	DP3AKB	
2	8	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	46.000.000	5	19.893.738	100,00	19.893.738	DP3AKB	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	45,30	289.460.000	55,84	256.080.000	123,28	256.080.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	8	2	02.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	39.460.000	100,00	6.080.000	100,00	6.080.000	DP3AKB	
2	8	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	30.000.000	2	6.080.000	100,00	6.080.000	DP3AKB	
2	8	2	02.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4	9.460.000	4	100,00			DP3AKB	
2	8	2	02.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	DP3AKB	
2	8	2	02.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota	2	250.000.000	2	250.000.000	100,00	250.000.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai	100,00	254.504.000	100,00	82.310.236	100,00	82.310.236	DP3AKB	
2	8	3	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	100,00	254.504.000	100	82.310.236	100,00	82.310.236	DP3AKB	
2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1	254.504.000	1	82.310.236	100,00	82.310.236	DP3AKB	
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	26,10	472.697.466	38,59	182.502.162	147,85	182.502.162	DP3AKB	
2	8	4	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	472.697.466	100,00	182.502.162	100,00	182.502.162	DP3AKB	
2	8	4	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah perangkat daerah yg mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	1	472.697.466	1	182.502.162	100,00	182.502.162	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak yang Telah terpenuhi	501	170.870.000	301,3	61.460.000	60,14	61.460.000	DP3AKB	
2	08	06	02.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	0,63	108.750.000	0,00	-	0,00	-	DP3AKB	
2	08	06	02.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	108.750.000	0	-	0,00	-	DP3AKB	
2	8	6	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3	62.120.000	2	61.460.000	66,67	61.460.000	DP3AKB	
2	08	06	02.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35	52.340.000	0	52.340.000	0,00	52.340.000	DP3AKB	
2	08	06	02.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	9.780.000	1	9.120.000	3,00	9.120.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100,00	184.296.000	100,00	183.728.500	100,00	183.728.500	DP3AKB	
2	8	7	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase capaian Layanan pendampingan bagi Anak korban kekerasan yang Memerlukan Penanganan Khusus (Anak disabilitas)	100,00	109.700.000	100,00	109.700.000	100,00	109.700.000	DP3AKB	
2	8	7	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	1	109.700.000	1	109.700.000	100,00	109.700.000	DP3AKB	
2	8	7	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan pendampingan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4	74.596.000	4	74.028.500	100,00	74.028.500	DP3AKB	
2	8	7	02.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	74.596.000	1	74.028.500	100,00	74.028.500	DP3AKB	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11,00	311.400.000	15,50	311.400.000	140,91	311.400.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	14	2	02.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan data Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	311.400.000	100,00	311.400.000	100,00	311.400.000	DP3AKB	
2	14	2	02.02	09	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	17	64.200.000	17	64.200.000	100,00	64.200.000	DP3AKB	
2	14	2	02.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	145.200.000	1	145.200.000	100,00	145.200.000	DP3AKB	
2	14	2	02.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	196	102.000.000	196	102.000.000	100,00	102.000.000	DP3AKB	
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)	18,90	3.514.454.000	59,2	3.045.807.016	313,12	3.045.807.016	DP3AKB	
						Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	14,70		10,0		68,03		DP3AKB	
2	14	3	02.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100,00	1.349.550.000	83,33	1.159.509.000	83,33	1.159.509.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	14	3	02.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	28	80.000.000	28	59.927.400	100,00	59.927.400	DP3AKB	
2	14	3	02.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	17	150.000.000	17	150.000.000	100,00	150.000.000	DP3AKB	
2	14	3	02.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	28	221.000.000	28	221.000.000	100,00	221.000.000	DP3AKB	
2	14	3	02.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17	818.550.000	17	648.581.600	100,00	648.581.600	DP3AKB	
2	14	3	02.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	17	80.000.000	17	80.000.000	100,00	80.000.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	14	3	02.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100,00	738.000.000	100,00	590.400.000	100,00	590.400.000	DP3AKB	
2	14	3	02.02	1	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1	346.000.000	1	276.800.000	100,00	276.800.000	DP3AKB	
4	14	3	02.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	196	392.000.000	196	313.600.000	100,00	313.600.000	DP3AKB	
2	14	3	02.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	100,00	983.904.000	100,00	957.898.016	100,00	957.898.016	DP3AKB	
2	14	3	02.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39	20.700.000	39	20.694.016	100,00	20.694.016	DP3AKB	
2	14	3	02.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1127	518.389.000	1127	517.398.000	100,00	517.398.000	DP3AKB	
2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	17	401.915.000	17	388.578.000	100,00	388.578.000	DP3AKB	
2	14	3	02.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	14.100.000	1	14.098.000	100,00	14.098.000	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	14	3	02.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	25	28.800.000	25	17.130.000	100,00	17.130.000	DP3AKB	
2	14	3	02.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100,00	443.000.000	100,00	338.000.000	100,00	338.000.000	DP3AKB	
2	14	3	02.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1,00	9.000.000	1,00	9.000.000	100,00	9.000.000	DP3AKB	
2	14	3	02.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	28	434.000.000	28	329.000.000	100,00	329.000.000	DP3AKB	
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (persen)	100	1.970.956.000	100,00	1.316.902.700	100,00	1.316.902.700	DP3AKB	
2	14	4	02.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	100,00	1.970.956.000	100,00	1.316.902.700	100,00	1.316.902.700	DP3AKB	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2	14	4	02.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	360.000.000	20	356.000.000	100,00	356.000.000	DP3AKB	
2	14	4	02.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	196	1.234.800.000	196	943.662.700	100,00	943.662.700	DP3AKB	
2	14	4	02.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10	376.156.000	10	17.240.000	100,00	17.240.000	DP3AKB	

Keterangan table TABEL 2.106

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat 2 program, 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang tidak mencapai target dari hasil evaluasi realisasi program dan kegiatan dari Dokumen renja DP3AKB tahun 2023
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ternyata hanya 8 program, 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang target dari hasil evaluasi realisasi program dan kegiatan dari Dokumen Renja DP3AKB tahun 2023
3. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ada 2 program yang melebihi target yang direncanakan dari hasil evaluasi
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
 - a. Mewujudkan pelayanan administrasi yang baik dan bersih
 - b. Meningkatkan kualitas keluarga melalui Keluarga Berencana
 - c. Meningkatkan Keluarga Sejahtera
 - d. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender terhadap pelayanan Pemberdayaan Perempuan
 - e. Mewujudkan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya antara lain:
 - a. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai tahap perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku serta disiplin dalam beranggaran. Sehingga ada

konektifitas antara tahapan yang satu dengan tahapan lainnya.

- b. Memperhatikan penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan penyusunan RKPD, Renja, RKA, KUA-PPAS sampai pada DPA benar-benar merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan
- c. Memperhatikan konektivitas antara penyusunan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah, sehingga target kinerja dan capaian kinerja yang ditetapkan dapat diukur, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dapat tercapai dengan baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP3AKB

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 poin 12 dikatakan bahwa kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Untuk itu, dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 terhadap masyarakat telah ditetapkan Indikator Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Nilai Sakip Perangkat Daerah dimana adalah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Target yang dicanangkan pada indikator ini untuk tahun 2023 adalah sebesar 65 dan hasil yang dicapai sebesar 58,40. Capaian kinerjanya adalah sebesar 92.7%. Target belum mencapai 100%(hasil penilaian sakip tahun 2022) dikarenakan Aspek Perencanaan masih dalam proses perbaikan, dalam hal ini perbaikan dokumen RENSTRA!

2. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perempuan yang bekerja dan menganggur pada usia kerja (15 tahun keatas). Target yang dicanangkan pada indikator ini untuk tahun 2023 adalah sebesar 46,30% dan realisasinya sebesar 84,92% didapat dari 33.612 jumlah total partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi 39.578 jumlah total angkatan kerja perempuan. Capaian kinerjanya adalah 183,4%. Capaian sudah melebihi target, dikarenakan target yang dicanangkan terlalu rendah sedangkan sudah terdapat banyak lapangan pekerjaan bagi Perempuan(didapat dari data web statistic).

3. Rasio KDRT.

Dalam mengukur indikator rasio KDRT di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 yakni kasus KDRT berdasarkan data kepolisian Halmahera Utara sebanyak 50 kasus. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 615.86 dengan demikian capaian indikator ini sebesar 0,081% sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 0,063% Dengan demikian pada indikator ini juga tidak mencapai target yang sudah ditetapkan karena kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah.

4. Predikat Kabupaten Layak Anak

Predikat Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Target yang dicanangkan di tahun 2023 adalah 501, dan realisasi yang dicapai adalah 351(hasil penilaian tahun 2022). Capaian Kinerjanya adalah 87.75 %. Belum mencapai target dikarenakan masih banyak data data yang belum teradministrasi dengan baik, salah satunya masih sangat kurangnya SK Desa Ramah Anak yang terbentuk. Dari 196 desa yang ada di Halmahera utara , yang telah mempunyai SK Desa Ramah Anak baru sebanyak 14 Desa.(masih dalam tahap penilaian).

5. Total angka kelahiran (TFR)

Total angka kelahiran (TFR) adalah rata rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. Cara penghitungannya adalah dengan cara menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (ASFR) dikalikan dengan interval kelompok umur (5). yaitu $5 \times 392,79 = 1.964$ Per 1000 Penduduk Usia 19-49 Tahun di Kabupaten Halmahera Utara. Target yang dicanangkan adalah 2,40 dan realisasi yang di dapat adalah 1.964 Capaiannya adalah 134,57%. Dengan demikian indikator TFR

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2024

telah melebihi target, dikarenakan semakin banyak Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi di kabupaten Halmahera utara

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKB Kabupaten Halmahera Utara Tahun

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi capaian			proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	10	11		12
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah		67	61	63	65	67	70	73	40,55	58,40	0	70	73	Jika penyampaian data lebih akurat dan bertanggungjawab
2	Indeks Pemberdayaan Gender		70,61	66,93	67,73	68,95	70,61	72,72	75,34	89,38	89,71	90,08	72,72	72,72	Jika penyampaian data lebih akurat dan bertanggungjawab
3	Nilai Kabupaten Layak Anak		601	200	400	501	601	700	800	156	351	0	601	701	Jika penyampaian data lebih akurat dan bertanggungjawab
4	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	46,70	46,20	46,30	46,50	46,70	47	47	36,36	55,6	84,92	47	46,70	Jika penyampaian data lebih akurat dan bertanggungjawab
6	Rasio KDRT.	%	0,06	0,050	0,073	0,063	0,06	0,05	0,04	0,083	0,078	0,081	0,05	0,04	Jika penyampaian data lebih akurat dan bertanggungjawab

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2024

7	Total angka kelahiran (TFR)	%	2,30	2,45	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20	2,32	1,6	1,96	2,35	2,3	
8	Penurunan Total angka kelahiran (TFR) (Basis poin)	%	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	0,69	-0,72	-0,36	-0,05	-0,05	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AKB

Isu-isu yang menjadi perhatian bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Utara untuk 1 (satu) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. belum adanya regulasi tentang PPRG
2. Terbatasnya SDM yang memahami PPRG
3. kurangnya SDM lembaga layanan yang terlatih
4. belum maksimalnya pelayanan yang dipengaruhi kondisi geografis daerah
5. belum adanya pusat informasi sahabat anak (PISA)
6. Minimnya sarana dan prasarana transportasi untuk wilayah yang sulit dijangkau

Tugas pokok dan fungsi DP3AKB Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

- (a) Tugas Pokok DP3AKB adalah : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak, Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pengendalian Penduduk berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan.
- (b) Dalam menjalankan tugas DP3AKB menyelenggarakan fungsi adalah :
 - 1) Penyusunan program dan anggaran;
 - 2) Pengelolaan keuangan;
 - 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - 4) Pengelolaan urusan ASN;
 - 5) Perencanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 6) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- 7) Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, keluarga berencana, kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk;
- 9) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Pelaksanaan advokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 11) Pendataan dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 12) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- 13) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- 14) Pelaksanaan pelayanan KB;
- 15) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 16) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 17) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 18) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
- 19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada tupoksi DP3AKB tersebut diatas, maka bisa dianalisis tentang isu-isu penting apa saja yang dihadapi oleh DP3AKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan antara lain :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DP3AKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DP3AKB.

Untuk menjawab isu pertama ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Halmahera Utara telah berupaya untuk memetakan terlebih dahulu pelayanan apa saja yang akan disajikan kepada masyarakat, tentunya pemetaan tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan. Sebab hal kritis yang kadang terjadi adalah aparatur yang melakukan pelayanan kurang memahami tugas yang diembannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pimpinan dan seluruh aparatur yang melakukan pelayanan telah dibekali dengan diklat baik dari kementerian PP dan PA Republik Indonesia dan BKKBN Provinsi maupun BKKBN pusat.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DP3AKB.

Untuk menjawab isu yang kedua ini, secara konseptual perlu dilakukan kerangka analisis yang digunakan guna mengidentifikasi isu tersebut. Secara analitik bahwa permasalahan dan hambatan yang dihadapi saat ini selain faktor regulasi yang belum sepenuhnya dimengerti oleh aparatur namun ada hal lain juga yakni masih minimnya aparatur (SDM) yang mampu secara utuh menjalani tugas sebagaimana yang diharapkan, sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah tuntutan pelayanan prima yang harus dilaksanakan oleh DP3AKB baik dibidang PP, PA maupun KB serta tuntutan terhadap perencanaan anggaran yang berbasis kinerja. Hal ini juga bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan kompetensi masing-masing aparatur di DP3AKB untuk tetap sigap menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melaksanakan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah melalui proses dari bawah. Proses itu berupa melakukan penjaringan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Musrenbang tingkat kecamatan, dan hasilnya telah disampaikan ke Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan telah disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk itu, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibuat sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang dihadapi setiap Tahunnya yang telah termuat dalam rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

TABEL T.C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Program Dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat capaian kinerja perangkat Daerah	90	3.622.031.879	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat capaian kinerja perangkat Daerah	90	3.622.031.879	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat konsisten perencanaan perangkat daerah	100%	26.266.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat konsisten perencanaan perangkat daerah	100%	26.266.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3AKB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3AKB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.266.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.266.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase realisasi kinerja pelaksanaan anggaran perangkat daerah	100%	3.091.075.482	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase realisasi kinerja pelaksanaan anggaran perangkat daerah	100%	3.091.075.482	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AKB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.084.775.482	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AKB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.084.775.482	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	6.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	6.300.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana	100%	26.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana	100%	26.500.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DP3AKB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DP3AKB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	89.999.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	89.999.400	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3AKB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	89.999.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3AKB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	89.999.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	168.165.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	168.165.200	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3AKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1089200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3AKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1089200
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	DP3AKB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12Paket	15.073.000	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	DP3AKB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12Paket	15.073.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DP3AKB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	7.999.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DP3AKB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	7.999.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DP3AKB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.999.700	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DP3AKB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.999.700
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3AKB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.004.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3AKB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.004.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	129.999.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	129.999.700
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD pada DP3AKB yang teradministrasi dalam laporan Inventaris barang dan aplikasi SIMDA barang tahun berkenan	100%	78.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD pada DP3AKB yang teradministrasi dalam laporan Inventaris barang dan aplikasi SIMDA barang tahun berkenan	100%	78.000.000

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3AKB	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	78.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3AKB	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	78.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian kinerja indikator sub kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	96.024.897	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian kinerja indikator sub kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	96.024.897	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.833.300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.833.300	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.201.893	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.201.893	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.990.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.990.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	24.999.704	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	24.999.704	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	46.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	46.000.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3AKB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	46.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3AKB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	46.000.000	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	45,3	289.999.400	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	45,3	289.999.400	
	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>persentase perempuan di Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100%	59.999.800	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>persentase perempuan di Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100%	59.999.800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DP3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.999.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DP3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.999.800	
	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase perempuan yang menduduki di lembaga legislatif daerah</i>	100%	200.000.000	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase perempuan yang menduduki di lembaga legislatif daerah</i>	100%	200.000.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga yang menerima Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	29.999.600	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga yang menerima Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	29.999.600	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	29.999.600	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	29.999.600	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai	100%	295.479.700	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai	100%	295.479.700	
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota		Persentase desa yang mendapat layanan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	265.480.000	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota		Persentase desa yang mendapat layanan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	265.480.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKB	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen dak	235.480.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKB	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen dak	235.480.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	30.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	30.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan pendampingan perlindungan Perempuan	100%	29.999.700	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan pendampingan perlindungan Perempuan	100%	29.999.700	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	29.999.700	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	29.999.700	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentasi anak korban kekerasan yang terlayani/ditanga ni hingga selesai oleh instansi terkait	26,1	179.999.604	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentasi anak korban kekerasan yang terlayani/ditanga ni hingga selesai oleh instansi terkait	26,1	179.999.604	
	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	179.999.604	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	179.999.604	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	179.999.604	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	179.999.604	
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingka kabupaten	100	29.999.900	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingka kabupaten	100	29.999.900	
	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase capaian data terpilih gender dan anak</i>	100%	29.999.900	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase capaian data terpilih gender dan anak</i>	100%	29.999.900	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.999.900	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.999.900	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase indikator Kabupaten Layak Anak yang terpenuhi	14	259.999.400	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase indikator Kabupaten Layak Anak yang terpenuhi	14	259.999.400	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		Persentase PHA yang terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		Persentase PHA yang terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP3AKB	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP3AKB	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	150.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	109.999.400	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	109.999.400	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	49.999.900	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	49.999.900	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.999.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.999.500	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKB	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100%	200.520.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100%	200.520.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah		Persentase layanan pendampingan anak korban kekerasan	100%	30.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah		Persentase layanan pendampingan anak korban kekerasan	100%	30.000.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DP3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DP3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000		
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan pendampingan bagi Anak korban kekerasan yang Memerlukan Penanganan Khusus (Anak disabilitas)		101.500.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan pendampingan bagi Anak korban kekerasan yang Memerlukan Penanganan Khusus (Anak disabilitas)		101.500.000		
Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK	DP3AKB	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		101.500.000	Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK	DP3AKB	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		101.500.000		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang menyediakan pendampingan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100%	69.020.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang menyediakan pendampingan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100%	69.020.000		
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	DP3AKB	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		69.020.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	DP3AKB	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		69.020.000		

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11	349.200.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11	349.200.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Remaja umur 15-19 tahun	100%	349.200.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Remaja umur 15-19 tahun	100%	349.200.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DP3AKB	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	145.200.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DP3AKB	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	145.200.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3AKB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumem	204.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3AKB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumem	204.000.000	
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)	18,9	3.528.205.596	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)	18,9	3.528.205.596	
			Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	14,7				Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	14,7		
	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		<i>Persentase Kampung KB yang mendapatkan sosialisasi KEI</i>	100%	1.234.368.000	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		<i>Persentase Kampung KB yang mendapatkan sosialisasi KEI</i>	100%	1.234.368.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Pengendalian Program KKBPK	DP3AKB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	17 Laporan	143.868.000	Pengendalian Program KKBPK	DP3AKB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	17 Laporan	143.868.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	DP3AKB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	535.500.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	DP3AKB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	535.500.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP3AKB	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	255.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP3AKB	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	255.000.000	
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP3AKB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	100.000.000	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP3AKB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	100.000.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP3AKB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	17 Organisasi	200.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP3AKB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	17 Organisasi	200.000.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP3AKB	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sarana	100%	588.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP3AKB	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sarana	100%	588.000.000	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3AKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	196 orang	588.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3AKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	196 orang	588.000.000	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Fasilitas Kesehatan	100%	421.087.596	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Fasilitas Kesehatan	100%	421.087.596	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AKB	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	400 Orang	375.687.796,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AKB	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	400 Orang	375.687.796,00	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3AKB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39 Laporan	45.399.800,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3AKB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39 Laporan	45.399.800,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		persentase kampung kb yang menerima pelayanan	100%	1.284.750.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		persentase kampung kb yang menerima pelayanan	100%	1.284.750.000	
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas</i>	DP3AKB	<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>	Unit	840.000.000	<i>Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas</i>	DP3AKB	<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>	Unit	840.000.000	
	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	DP3AKB	Jumlah dokumen hasil itergrasi pembagunan lintas sektor di kampung KB	Dokumen	3.750.000,00	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	DP3AKB	Jumlah dokumen hasil itergrasi pembagunan lintas sektor di kampung KB	Dokumen	3.750.000,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DP3AKB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	28 Kampung KB	441.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DP3AKB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	28 Kampung KB	441.000.000	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Baduta Stunting	100%	1.804.799.700	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Baduta Stunting	100%	1.804.799.700	
	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	100%	569.999.700	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	100%	569.999.700	
	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	DP3AKB	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	1 Laporan	269.999.700	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	DP3AKB	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	1 Laporan	269.999.700,0 0	
	<i>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</i>	DP3AKB	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	20 Unit	300.000.000	<i>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</i>	DP3AKB	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	20 Unit	300.000.000,0 0	

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	1.234.800.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	1.234.800.000	
	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	DP3AKB	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	196 Laporan	588.000.000	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	DP3AKB	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	196 Laporan	588.000.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calón PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DP3AKB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	196 Laporan	646.800.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calón PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DP3AKB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	196 Laporan	646.800.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun rencana program kegiatan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yang terkait dan diinformasikan kedalam usulan program dan kegiatan. Proses penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme komunikasi, dan ditindaklanjuti dengan verifikasi sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Namun pada usulan program dan kegiatan untuk tahun 2025 yang diusulkan oleh masyarakat melalui anggaran dak

BAB. III**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA****3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi**

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana termasuk dalam bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Penduduk Tumbuh Seimbang dan target Millennium Development Goals (MDGs), Pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan.

Dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR 2,1 point dan NRR 1 point, maka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan adalah :

1. Revitalisasi program KB untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
2. Penyelerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Sementara arah kebijakan dan fokus pembangunan Provinsi Maluku Utara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu :

1. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;
2. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksualitas terhadap anak.

Sedangkan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mengacu pada misi

BKKBN Provinsi, yakni : “Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

untuk pembangunan yang berkelanjutan” dengan kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara mengacu pada kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, maka dirumuskan tujuan Rencana Kerja SKPD tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2021-2026;
2. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2021-2026;

Sedangkan sasaran Rencana Kerja tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatnya pemahaman dari aspek regulasi dalam rangka perbaikan administrasi untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas keluarga dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk membuat rencana keluarga melalui Keluarga Berencana;

3. Melaksanakan pemberdayaan perempuan dengan berbagai kegiatan agar perempuan bisa berdaya guna, bisa berlingkup dan bangkit dengan kesadaran akan tanggungjawab serta pemenuhan hak-hak dan kewajibannya sebagai perempuan juga melaksanakan pelayanan kepada anak-anak agar terlindung dari kekerasan dan eksploitasi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang cerdas, bermoral, dan bermartabat.

3.3. Program dan kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peningkatan dan pemantapan tata kelola pemerintahan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang dihadapi, maka program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pengadaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program perlindungan perempuan

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program peningkatan kualitas keluarga

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

7. Program perlindungan khusus anak

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
 - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
- b. Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
 - Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/

8. Program pengendalian penduduk

- a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

9. Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pengendalian Program KKBPK
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

10. Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)
 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calón PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Rumusan Rencana program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah kabupaten halmahera utara
Tahun anggaran 2025 dan prakiraan maju tahun 2026
Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			TARGET CAPAIAN KINERJS	PAGU INDIKATIF
					APBD II				
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja perangkat Daerah	DP3AKB	90%	3.459.812.390			90%	3.505.595.947
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	DP3AKB	100%	31.000.000			100%	36.000.000
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3AKB	4 dok	18.000.000	DAU		4 dok	18.500.000
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3AKB	1 dok	3.000.000	DAU		1 dok	3.500.000
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3AKB	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	2.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	-------------

2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DP3AKB	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	2.000.000
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DP3AKB	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	2.000.000
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AKB	4 lap	7.000.000	DAU		4 lap	8.000.000
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP3AKB	100%	2.878.095.947			100%	2.878.595.947
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AKB	406 org	2.870.095.947	DAU		406 org	2.870.095.947
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AKB	4 lap	8.000.000	DAU		4 lap	8.500.000
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	DP3AKB	100%	32.000.000			100%	34.000.000
2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DP3AKB	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	2.000.000

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3AKB	12 lap	1.000.000	DAU		12 lap	2.000.000
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3AKB	12 lap	30.000.000	DAU		12 lap	30.000.000
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	DP3AKB	100%	115.000.000			100%	125.000.000
2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DP3AKB	29 Paket	25.000.000	DAU		29 Paket	25.000.000
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3AKB	4 org	90.000.000	DAU		4 org	100.000.000
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP3AKB	100%	182.400.000			100%	198.000.000
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12 paket	15.400.000	DAU		12 paket	17.000.000
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12 paket	15.000.000	DAU		12 paket	16.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	-------------

2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DP3AKB	12 paket	8.000.000	DAU		12 paket	10.000.000
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DP3AKB	12 dok	6.000.000	DAU		12 dok	7.000.000
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3AKB	12 lap	8.000.000	DAU		12 lap	8.000.000
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AKB	30 lap	130.000.000	DAU		30 lap	140.000.000
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capain ketersediaan Barang Milik Daerah	DP3AKB	85%	78.000.000			85%	78.000.000
2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DP3AKB	1 unit	78.000.000	DAU		1 unit	78.000.000
2.08.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP3AKB	100%	97.316.443			100%	106.000.000
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AKB	12 lap	26.786.600	DAU		12 lap	30.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	------

2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP3AKB	12 lap	19.529.843	DAU		12 lap	25.000.000
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12 lap	27.000.000	DAU		12 lap	27.000.000
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12 lap	24.000.000	DAU		12 lap	24.000.000
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capain Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP3AKB	100%	46.000.000			100%	50.000.000
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DP3AKB	5 unit	46.000.000	DAU		5 unit	50.000.000
02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	DP3AKB	46,2	197.000.000			46,70	200.000.000,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>persentase capain perempuan di Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	DP3AKB	6%	57.000.000			6,7%	50.000.000,00

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 dok	57.000.000	DAU		1 dok	50.000.000,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase capain perempuan yang menduduki di lembaga legislatif daerah</i>	DP3AKB	30%	100.000.000			30%	100.000.000
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga yang menerima Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	DP3AKB	15	40.000.000			16	50.000.000
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DP3AKB	1 dok	40.000.000	DAU		1 dok	50.000.000
02:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai	DP3AKB	100%	151.500.000			100%	161.500.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	-------------

2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang mendapat layanan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	DP3AKB	15%	151.500.000			20%	161.500.000
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 dok	101.500.000	DAK		1 dok	101.500.000
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	30 prgkt daerah	50.000.000	DAU		30 prgkt daerah	60.000.000
02:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	DP3AKB	18,7	150.000.000			15,0	200.000.000
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AKB	40%	150.000.000			41%	200.000.000
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 uptd	150.000.000	DAU		1 uptd	200.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	------

02:08:05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten	DP3AKB	100%	50.000.000			100	55.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase capaian data terpilah gender dan anak</i>	DP3AKB	100%	50.000.000			100%	55.000.000
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 dok	50.000.000	DAU		1 dok	55.000.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang terpenuhi	DP3AKB	20	325.000.000			24	255.000.000
2.08.06.2.01	Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PHA yang terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1%	150.000.000			1%	200.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	-------------

2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP3AKB	2 org	150.000.000	DAU		2 org	200.000.000
2.08.06.2.02	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	DP3AKB	8	175.000.000			23	55.000.000
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	35 org	175.000.000	DAU		35 org	55.000.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	DP3AKB	100%	329.160.000			100%	340.140.000
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian layanan pendampingan anak korban kekerasan	DP3AKB	0,049%	30.000.000			0,048%	50.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	-------------

2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 Perangkat Daerah	30.000.000	DAU		1 Perangkat Daerah	50.000.000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				299.160.000				290.140.000
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	DP3AKB	Orang	230.140.000			Orang	230.140.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	DP3AKB	Orang	69.020.000			Orang	60.000.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	DP3AKB	11	410.400.000			11	410.400.000

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Remaja umur 15-19 tahun	DP3AKB	100%	410.400.000			100%	410.400.000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	17 kec	Laporan	60.000.000			Laporan	60.000.000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	17 kec	Laporan	146.400.000			Laporan	146.400.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	17 kec	12 dok	204.000.000	DAK		12 dok	204.000.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)	DP3AKB	20,3	2.938.015.000			21,0	2.704.515.000
		Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	DP3AKB	9,8				7,4	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase capaian desa yang mendapatkan sosialisasi	DP3AKB	100%	962.319.000			100%	622.319.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	------

2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	DP3AKB	17 lap	425.000.000	DAK		17 lap	425.000.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	17 kec	Dokumen	340.000.000			Dokumen	340.000.000.00
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP3AKB	Laporan	97.319.000			Laporan	97.319.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi	100.000.000			Organisasi	100.000.000

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2.14.03.2.02	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.042.720.000				1.042.720.000
2.14.03.2.02.0004	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1.042.720.000				1.042.720.000
2.14.03.2.03	Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Fasilitas Kesehatan	DP3AKB	85%	596.976.000			85%	603.476.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AKB	400 org	553.476.000	DAK		400 org	553.476.000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3AKB	39 lap	43.500.000	DAU		39 lap	50.000.000

RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA

2025

2.14.03.2.04	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-Kb	<i>persentase kampung kb yang menerima pelayanan</i>	DP3AKB	14,29%	336.000.000,00			14,29%	436.000.000
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>	DP3AKB	28 unit	-	DAK		28 unit	100.000.000
2.14.03.2.04.0006	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				336.000.000				336.000.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AKB	100%	1.603.185.000			100%	1.633.185.000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	DP3AKB	100%	309.585.000			100%	339.585.000
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				9.585.000				9.585.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	-------------

2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	DP3AKB	1 lap	170.000.000	DAU		1 lap	200.000.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3AKB	20 unit	130.000.000	DAK		20 unit	130.000.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AKB	100%	1.293.600.000			100%	1.293.600.000
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	DP3AKB	196 lap	588.000.000	DAK		196 lap	588.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	------

2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				705.600.000				705.600.000
	9614072390	TOTAL			9.614.072.390		TOTAL		9.465.335.947

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Prioritas
1	2	4	5	6	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja perangkat Daerah	90	3.459.812.390	1
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	45,3	197.000.000	9
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai	100%	151.500.000	8
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentasi anak korban kekerasan yang terlayani/ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	26,1	150.000.000	3
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingka kabupaten	100	50.000.000	4

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2025
---	------

6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator Kabupaten Layak Anak yang terpenuhi	14	325.000.000	2
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100%	329.160.000	5
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11	410.400.000	10
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)	18,9	2.938.015.000	7
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Baduta Stunting	100%	1.603.185.000	6

BAB. V PENUTUP

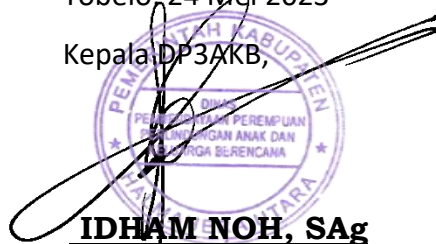
Dengan adanya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2024, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran visi dan misi, Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran ditetapkan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2024 semoga bermanfaat bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 24 Mei 2023

Kepala DP3AKB,



IDHAM NOH, SAg

Pembina, IV/a

Nip. 197707062005011016